BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalaah

Teori politik yang pertama timbul dalam sejarah Islam ialah mengenai jabatan kepala negara. Siapa yang berhak menjadi kepala negara sebagai pengganti Nabi dan bagaimana cara pengangkatannya, itulah yng menimbulkan perbedaan faham di bidang politik dalam Islam (Nasution,1985:101).

Secara etimologi, perkataan "*politik* " berasal dari bahasa Yunani "*Polis*" yang berarti kota. Pada masa modern, istilah politik berarti seni atau ilmu tentang pemerintahan, yaitu suatu ilmu yang berkaitan dengan prinsip pengaturan dan pengawasan rakyat yang hidup dalam masyarakat (Ma`arif, 1996:11-12).

William T. Bluhm, berpendapat: Politik adalah suatu proses sosial yang bercirikan aktifitas yang menyangkut persaingan dan kerja sama dalam melaksanakan kekuasaan dan yang mencapai puncaknya dalam pembuatan putusan untuk kelompok (Zainuddin, 1992:1).

Memang ungkapan kata politik sukar dirumuskaan dalam beberapa kata saja, karena penggunaannya mempunyai arti panjang lebar disamping bermacam kemungkinan pemaknaannya. Menurut Wilbur White, penulis White`s Political Dictionary, ilmu politik adalah mempelajari asal mula, bentuk-bentuk dan proses-proses negara dan pemerintahan (Iswara, 1980 : 38).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Politik berlangsung pada lingkungan yang disebut "sistem politik". Demikian pula, ilmu politik adalah ilmu untuk diterapkan dalam menganalisa interaksi dalam sistem politik (Rudy, 1993 : 8-9).

Dengan adanya sistem politik, yaitu suatu konsepsi antara lain ketentuan tentang siapa sumber kekuasaan negara; siapa pelaksana kekuasaan tersebut; apa dasar dan bagaimana cara-cara untuk menentukan kepada siapa kewenangan melaksanakan kekuasaan itu bertanggung jawab dan bagaimana bentuk tanggung jawab tersebut (Sjadzali, 1993: 2-3).

Adapun perkataan plitik dalam istilah syara` disebut " *siyasah*". Kata siyasah berasal dari bahasa Arab " *sasa*", yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah (Pulungan, 1994 : 22). Jadi siyasah menurut bahasa adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

Ungkapan kata siyasah itu mempunyai banyak arti, sehingga sukar dirumuskan dalam beberapa kata saja. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdur Rahman Taj mendefinisikan :

"Siyasah syar`iah adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengornisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syari`at dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal *(kulli)* untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh nash *tafshili* yang *juz`i* dalam Al-Quran dan Sunnah" (Pulungan, 1994 : 25).

Definisi-definisi tersebut menegaskan bahwa wewenang membuat segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah, ulil amri). Karena itu segala bentuk hukum peraturan dan kebijaksanaan siyasi yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama semua produk itu secara substansial tidak bertentangn dengan jiwa syariat.

Lebih lanjut David Easton menyatakan pula bahwa sistem politik dapat diperkenalkan sebagai perangkat interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkah laku sosial, melalui nilai-nilai dialokasikan secara otoratif kepada masyarakat (Haryanto, 1982 : 2).

Bagi Hakim Javid Iqbal, masalah pokok teori politik Islam adalah pendirian negara Islam yang berdasarkan konsep falah (kebahagiaan). Dengan tiga ciri pokok negara Islam : keunggulan syari`at, persatuan dan solidaritas umat, dan lembaga yang memerintah masyarakat (khilafah) (Ahmad, 1994 : 18).

Pertemuan di Tsaqifah Bani Saidah, pelaksanaan syura (musyawarah) yang pertama dilakukan oleh umat Islam sejak wafatnya Nabi untuk memilih khalifah beliau dan peristiwa tahkim antara Ali dan Muawiyah, menjadi titik tolak yang penting bagi sejarah perpolitikan umat Islam, sebab secara aspiratif umat Islam dalam dua peristiwa itu mulai berpolarisasi untuk mengorbitkan dalam beberapa aliran yaitu: Khawarij, Syi`ah, Mu`tazilah, dan Ahlu Sunnah Waljama`ah atau Sunni (Pulungan, 1994 : 212).

Timbulnya pertentangan-pertentangan antara aliran tersebut mendorong para juris sunni mengembangkan teori-teori politik mereka tentang khalifah. Dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ungkapan lain latar belakang kondisi sosial politik tersebut sangat dominan mempengaruhi para juris sunni untuk mengembangkan teori-teori politik mereka (Pulungan,1994 : 215-216).

Diantara para pemikir-pemikir juris sunni terkemuka dalam sejarah Islam yang hidup pada abad 14 Masehi, adalah Ibnu Khaldun yang sering digambarkan sebagai seorang kritikus yang tajam dan pembangun sosiologi (. Yusuf, 1963 : 72).

Ibnu Khaldun yang terkenal dengan bukunya "Muqaddimah", menyatakan bahwa topik utama dalam buku Muqaddimah itu bukan hanya masalah politik tentang konsep kekuasaan dan konsep negara saja. Akan tetapi juga dibicarakan tentang kehidupan manusia dalam masyarakat atau peradapan manusia (Zainudin, 1992 : 15-16).

Untuk melandasi konsep tentang perlunya suatu negara dalam kehidupan umat manusia, Ibnu Khaldun menambahkannya dari watak dan perkembangan masyarakat, manusia itu hanya makhluk sosial, sebab mereka membutuhkan apa yang dinamakan masyarakat atau suatu kota. Sebagai akibat dari adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia memiliki sifat agresif. Sifat ini akan mengancam pergaulan dalam masyarakat, sehingga diperlukan seorang *wazi`*(pemimpin) yang mempunyai kewibawaan dan kekuasaan (*mulk*) yang mampu mengendalikan agresitifitas tadi, untuk melindungi kepentingan bersama. Menurut Ibnu Khaldun, kerja sama itu bukan hanya didasarkan atas nulari manusia itu secara murni semata, bahkan juga merupakan hasil pemikiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Inilah merupakan ciri khas untuk membedakan antara manusia dengan hewan. Tata kehidupan yang mempunyai wazi` yang disertai mulk adalah yang disebut negara.

Berdasarkan pendapat tersebut, Ibnu Khaldun memberi suatu kesimpulan bahwa negara (*daulah*), tidak mungkin terwujud tanpa adanya masyarakat. Demikian pula sebaliknya masyarakat tanpa negara adalah mustahil. Hal ini disebabkan karena dorongan agresifitas yang ada pada diri manusia dan memerlukan pula tindakan pencegahannya. Oleh karena itu, antara masyarakat dan negara senantiasa merupakan suatu kesatuan, meskipun antara keduanya terdapat perbedaan. Jika terjadi kekacauan disalah satu pihak dari keduanya, maka akan mengakibatkan kekacauan pada lainnya. Dengan demikian lenyapnya yang satu akan membawa lenyapnya yang lain (Issawi, 1962 : 139).

Selanjutnya dikemukakan, bahwa hubungan negara dengan kekuasaan (*mulk*), yang juga sama-sama mempunyai keterkaitan dengan peradapan masyarakat (*`umran*) dapat diumpamakan sebagai hubungan antara bentuk dengan bendanya (Ralibi, 1965 : 143).

Untuk menjaga suatu kelangsungan hidup suatu negara, maka diperlukan kekuasaan yang memiliki daya paksa, sehingga ia dapat memaksakan kehendaknya kepada warganya, agar mampu menjaga dan melindungi kepentingan bersama, sebagaimana tujuan pembentukan kekuasaan dan wibawa itu sendiri. Selain dari kekuasaan yang memiliki daya paksa, negara juga harus didukung oleh unsur `Ashabiyah (rasa solidaritas golongan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Khaldun mengatakan bahwa unsur agama tidak mutlak diperlukan dalam mempersatukaan masyarakat. Untuk mengatasi permusuhaan diantara sesama warga kekuasaan pemerintah atau kepala negara akan mampu mengendalikannya, meskipun tanpa agama. Unsur agamanya menurutnya, hanya berfungsi sebagai alat untuk memperkokoh kekuatan yang sebelumnya telah dipupuk oleh negara melalui solidaritas dan jumlah penduduknya (Issawi,1962 : 180).

Apabila dalam ilmu politik biasanya konsep kekuasan dan konsep negara dianggap sebagai dua buah konsep yang berbeda dalam hal penekannya dan malah juga saling bertentangan, meskipun dalam prakteknya kedua hal itu tidak dapat dipisahkaan, sebaliknya Ibnu Khaldun berpendapat bahwa kedua konsep itu pada hakikatnya, dipandang dari asal usul, merupakan suatu kesinambungan, dan dalam perkembangan selanjutnya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan (Zainuddin, 1992 : 21). Kekuasaan pada mulanya timbul dalam kumpulan manusia, atau masyarakat, sederhana dalam bentuk yang amat bersahaja, lalu setelah itu mengalami pertumbuhan dan perkembangannya dalam negara. Jadi baginya tidak terdapat pertentangan di antara kedua konsep itu, karena keduannya itu pada mulanya tidak lain daripada dua tahap dari satu perkembangan, dan selanjutnya merupakan dua hal yang tidak terpisahkan.

Oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa antara konsep kekuasaan dan konsep negara terdapat upaya dari pihak pendukungnya masing-masing untuk menjadikan konsep pilihannya sebagai konsep utama dalam ilmu politik. Ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentu saja dengan tidak melupakan kenyataan bahwa perbedaan ini hanya mengenai konsep saja, karena dalam praktek sudah pasti bahwa tidak ada negara yang tidak menggunakan kekuasaan dalam pelaksanaan memerlukan sarana organisatoris untuk melaksanakan upaya-upayannya ditengah-tengah masyarakat, dan negara adalah bentuk tertinggi dari sarana organisatoris itu. Walaupun demikian, pertarungan antara kedua konsep itu, yang mungkin telah bergejolak selama lebih dari satu abad sampai sekarang, tampaknya belum selesai juga. Intensitasnya mungkin bertambah atau berkurang sesuai dengan perkembangan situasi dari waktu ke waktu, namun masalahnya tetap belum terselesaikan.

B. Indetifikasi Masalah

Masalah-masalah yang timbul berdasarkan latar belakang pemikiran diatas dapat meliputi hal-hal sebagai berikut :

Bagaimana pemikiran Ibnu Khaldun tentang politik yang meliputi :

1. Bagaimana pemikiran politik Ibnu Khaldun sebagai sosiolog Islam dalam menguraikan terjadinya asal usul negara melalui empirik, manusia saling mempunyai kepentingan dan kadang-kadang kepentingannya bertentangan.
2. Kepentingan-kepentingan yang bertentang memerlukan kekuasaan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan tersebut, dengan kata lain diperlukan negara .
3. Negara akan kuat kalau didasarkan pada ashabiyah dan agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pembatasan Masalah

Kajian ini membahas dan mengkaji pemikiran politik Ibnu Khaldun tentang kenegaraan dan pemerintahan. Dengan demikian maka kajian ini mengesampingkan pemikiran Ibnu Khaldun yang berhubungan dengan kebijaksanaan lainnya diluar masalah kenegaraan dan pemerintahan.

D. Perumusan Masalah

Masalah studi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep pemikiran Ibnu Khaldun tentang politik kenegaraan dan pemerintahan.
2. Apa alasan pemikiran politik Ibnu Khaldun tentang masalah tersebut.

E. Tujuan Studi

Kajian ini bertujuan untuk :

1. Mendiskripsikan pemikiran Ibnu Khaldun tentang politik
2. Menganalisis latar belakang pemikiran Ibnu Khaldun tentang polik.

F. Kegunaan Studi

Hasil studi ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk :

1. Untuk memperkaya khasanah pengetahuan tentang pemikiran Ibnu Khaldun dan dapat digunakan sebagai penelitian lebih lanjut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dapat dijadikan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan politik di Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan penelitian kepustakaan (bibliographic research).

2. Data Yang Telah Dihimpun

Data yang telah dihimpun meliputi :

2.1. Data tentang riwayat hidup Ibnu Khaldun

2.2. Data tentang situasi politik dan pemikiran politik Ibnu Khaldun semasa hidupnya.

2.3. Data karier politik Ibnu Khaldun

3. Sumber Data

Sumber data dalam studi ini meliputi :

3.1. Muqaddimah, Ibnu Khaldun

3.2. Ibnu Khaldun Riwayat dan karyanya, Ali abdulwahid wafi'.

3.3. Ibnu Khaldun; masyarakat dan negara, Osman Raliby.

3.4. Ibnu Khaldun dan pola pemikiran Islam, Fuad Bali

3.5. Kekuasaan dan negara, A Rahman Zainuddin.

3.6. Filsafat tentang sejarah, Charles Issawi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Analisa Data

Data yang telah diperoleh berkenaan dengan pemikiran Ibnu Khaldun didiskripsikan kemudian dianalisa latar belakangnya. Dengan demikian penelitian ini terwujud diskriptif analitik.

H. Sistimatika Pembahasan

Sistimatika pembahasan ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Merupakan pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini meliputi : latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan studi, kegunaan studi, metode penelitian dan sistimatika pembahasan.

Bab II : Bab ini merupakan gambaran umum tentang perjalanan hidup Ibnu Khaldun yang meliputi : riwayat hidup, situasi politik dan pengalaman Ibnu Khaldun semasa hidupnya, perjuangan dan karier Ibnu Khaldun serta karya-karya Ibnu Khaldun.

Bab III : Bab ini merupakan penelitian tentang pemikiran politik Ibnu Khaldun meliputi masalah kenegaraan : asal mula terjadinya negara, kewajiban mengangkat kepala negara, syarat-syarat kepala negara, solidaritas kelompok (*Ashabiyah*) dan agama serta bentuk-bentuk pemerintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab IV : Bab ini merupakan analisa dari latar belakang pemikiran Ibnu Khaldun yang terdiri dari analisa dari segi kenegaraan dan pemerintah.

Bab V : Merupakan penutup dari penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id